

**ANALISIS TINDAK PIDANA HUKUM ISLAM TERHADAP JUDI
*ONLINE***

(Studi Kasus Desa Lautang Kec. Belawa Kab. Wajo)



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
pada Fakultas Syariah dan Hukum**

Oleh:

**ASWAR ARDI
NIM: 10400113017**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

MAHASISWA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI:

NAMA : ASWAR ARDI
NIM : 10400113017
Tempat/Tgl. Lahir : Belawa, Wajo 11 Agustus 1995
Jur/Prodi : Pebandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Samata (Gowa)
Judul : Analisis Tindak Pidana Hukum Islam terhadap Judi
Online (studi kasus Desa Lautang Kec. Belawa Kab. Wajo)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar dan hasil karya sendiri. Jika kemuadian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar 8 Februarui 2018

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ASWAR ARDI
10400113017

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi Online (studi kasus desa lautang kec. Belawa kab. Wajo)”, yang disusun oleh Aswar Ardi, NIM: 10400113017, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 8 Februari 2018 M, bertepatan dengan 22 Jumadil Awal 1439 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dengan beberapa perbaikan.

Samata, 8 Februari 2018 M
22 Jumadil Awal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Supardin M.H.I	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Nur Taufiq Sanusi M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Achmad Musyahid M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Abdi Wijaya M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
NIP.19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Alhamdulillah Rabbil A'lamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Tindak Pidana Hukum Islam terhadap Judi Online (Studi kasus Desa Lautang Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)”** dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada sang revolusioner sejati Baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat.

Dalam rangka proses penyelesaiannya, banyak kendala dan hambatan yang ditemukan penyusun, tetapi dengan keyakinan dan usaha yang luar biasa serta tak luput kontribusi sebagai pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan, meskipun demikian penyusun menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak.

Selain itu penyusun juga perlu mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini membantu proses perkuliahan penyusun sebagai mahasiswa strata satu hingga menyelesaikan skripsi sebagai bagian akhir dari perjalanan studi penyusun, akumulasi ungkapan terima kasih itu penulis haturkan kepada :

1. Ayahanda penulis H. Ardi, dan Ibunda Hj. Dali, yang sangat saya cintai dan seluruh keluarga yang telah banyak memberikan dukungan moral dan material serta doa untuk penulis dalam penyelesaian proses akademik.
2. Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata satu (S1) disalah satu kampus terbesar di Indonesia Timur ini, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag, selaku Dekan Syariah dan Hukum.

4. Bapak Dr. Abd. Rahman R, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Hj. Syamzan Syukur, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. Abd. Muin, M.Hum selaku wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Abdillah Mustari M.Ag dan Dr. Achmad Musyahid M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Achmad Musyahid M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Abdiwijaya M.Ag selaku Pembimbing II yang banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dengan segala jerih payah dan ketulusan dalam mengajar, membimbing dan memandu perkuliahan, sehingga memperluas wawasan keilmuan penulis.
8. Para Staf Tata Usaha dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian administrasi selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
9. Teristimewa kepada Rabiatul Adawiyah S.IP yang telah banyak membantu dan menemani penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman seangkatan Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan 2013 dan teman-teman angkatan KKN 53 Sekecamatan Mallawa terkhusus Posko Gattareng, terima kasih karena sempat menjalani kehidupan kemahasiswaan yang penuh suka duka.
11. Saudaraku yang ada di Rastafaria Production Agus, Rifaldy, Asbar, Haidir, Fajar, Sahrir, Andi Nur, Sholeh, Sutrisno, Fajar Nur, Adil dan Ahmad Nur Sigit yang banyak membantu selama proses penyusunan skripsi.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis memohon agar mereka yang berjasa kepada penulis diberikan balasan yang berlipat ganda dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. AMIN.

#YAKUSA#

Samata, 11 Februari 2018

Penulis

ASWAR ARDI
NIM : 10400113017



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1-12
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS	13-42
A. Perjudian <i>Online</i>	13
1. Pengertian Perjudian	13
2. Dasar Hukum Perjudian	15
3. Macam-macam Perjudian	16
4. Perjudian Ditinjau dari Hukum Pidana	19
B. Judi Online Ditinjau Dari Norma Agama	24
1. Unsusr-unsur Tindak Pidana Perjudian	26

2. Sanksi Hukum Perjudian	29
C. Judi <i>Online</i> Dalam Pandangan Masyarakat	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43-47
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Sumber Data	44
D. Metode Pengumpulan Data	45
E. Instrumen Penelitian	46
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48-72
A. Gambaran Umum Desa Lautang Kecamatan Belawa	48
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Untuk Melakukan Perjudian <i>Online</i>	54
C. Dampak Yang Ditimbulkan Judi <i>Online</i> di Desa Lautang Kec. Belawa Kab. Wajo	59
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Desa Lautang Kecamatan Belawa	62
E. Analisis Hukum Islam Terhadap Judi Online	64
BAB V PENUTUP	73-75
A. Kesimpulan	73
B. Implikasi Penelitian	74
DAFTAR PUSTAKA	76-77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

TRANSILITERASI

Transliterasi huruf Arab kepada huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Damma</i>	u	u

C. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	<i>Fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifah

هَوْلَ: haula

D. Maddah atau Vokal Panjang

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
اِي	<i>Kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
اُو	<i>Dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

E. Ta'marbutah

Ta'marbutah yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) dilambangkan dengan huruf "t". ta'marbutah yang mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudal al-at fal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (Tasydid)

Tanda Syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab, dalam transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjainah*

G. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" (ل) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-biladu*

H. Hamzah

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah terletak di tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal

أُمِرْتُ : *umirtu*

2. Hamzah tengah

تَأْمُرُونَ : *ta' muruna*

3. Hamzah akhir

شَيْءٌ : *syai'un*

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

Fil Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

J. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله دينُ الله *Dinullah billah*

Adapun ta'marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fi rahmatillah*

K. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandang.

Contoh: *Syahrul ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

Wa ma Muhammadun illa rasul.

ABSTRAK

Nama : ASWAR ARDI
Nim : 10400113017
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : ANALISIS TINDAK PIDANA HUKUM ISLAM
TERHADAP JUDI *ONLINE* (Studi Kasus Desa Lautang Kec. Belawa Kab. Wajo)

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagai mana analisis tindak pidana hukum islam dengan sub permasalahan: 1) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan perjudian *online*.? 2) Bagaimana dampak yang ditimbulkan judi *online* di Desa Lautang Kec. Belawa Kab. Wajo.? 3) Bagaimana upaya penanggulangan judi *online* di Desa Lautang Kec. Belawa Kab. Wajo.?

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field Research*), karna dilakukan secara turun langsung dilapangan untuk sebagai objek penelitian. Adapun metode pendekatan yang saya gunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini saya menggunakan data-data dari sumber, 1) Observasi, 2) Wawancara, dan 3) Dokumentasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1) Mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan perjudian *online*. 2) Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari judi *online* dimasyarakat Desa Lautang, Kecamatan Belawa. 3) Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana judi *online*.

Fakta menunjukkan dengan jelas bahwa Islam telah mengajarkan kepada semua umat bagaimana berakhlak dan memberi lisan yang baik. Namun Akhlak dan lisan yang baik ini, belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian umat Islam karna kenapa? Karna sebagian dari umat Islam masih banyak yang melenceng dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri Padahal jika kita mengkaji ajaran-ajaran Islam secara mendalam, maka kita dapat membedakan antara mana akhlak yang baik dan mana akhlak yang buruk.

Sejalan dengan hasil survei yang saya lakukan, maka dapat saya simpulkan bahwan masyarakat Desa Lautang, Kec. Belawa Kab. Wajo belum sepenuhnya memahami ajaran-ajaran Islam. Dalam era modern ini banyak sekali umat atau masyarakat yang melakukan tindak pidana perjudian atau perbuatan yang dilarang oleh Islam, dengan menggunakan alat-alat yang canggih, misalnya kompuer, telephon, dan media elektronik lainnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini pada dasarnya adalah payung hukum dibidang telekomunikasi, *computing* dan *entertainment* (media), dimana pada awalnya masing-masing masih berdiri sendiri-sendiri. Undang-Undang ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum, agar pada saat kita bertransaksi elektronik seperti transaksi keuangan menggunakan ponsel/komputer, dari mulai saat memasukkan *password*, melakukan transaksi keuangan, sampai dengan transaksi selesai/tertuju, terdapat jaminan atas proses transaksinya tersebut.

Kepastian hukum ini diperlukan untuk semua warga Indonesia pada umumnya dan para pengguna jasa internet/jaringan pada khususnya, hal ini wajar mengingat tidak menutup kemungkinan didalamnya selain terdapat konten negatif juga terdapat kejahatan didalam *networking* dan (dalam menggunakan jaringan internet).

Perasaan untuk memperoleh keadaan financial yang lebih tinggi kerap memicu seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik, sepanjang keinginan yang dilakukan ditempuh dengan jalan yang positif, pastinya sah-sah saja, yang tak wajar adalah jika keinginan tersebut dilakukan dengan berbagai cara termasuk juga cara-cara yang negatif yang jelas-jelas dilarang oleh Undang-Undang juga agama, misalnya “Perjudian”.

Adapun tindak pidana perjudian itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Menurut hukum Islam judi ialah suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang dan yang lainnya, masing-masing dari mereka ada yang menang ada juga yang kalah (untung dan rugi).

Internet menciptakan berbagai peluang baru dalam kehidupan masyarakat, internet juga sekaligus menciptakan peluang-peluang baru bagi kejahatan. Di dunia virtual orang melakukan berbagai perbuatan jahat (kejahatan) yang justru tidak dapat dilakukan di dunia nyata. Kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarana perbuatannya. Kejahatan yang dilakukan di dunia virtual dengan menggunakan komputer itu disebut “kejahatan komputer” atau “*cyber crime*”. Kejahatan-kejahatan komputer telah menciptakan masalah-masalah baru bagi tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh para penegak hukum.

Perjudian *online* merupakan salah satu dari jenis tindakan *Cyber Crime*. Salah satu penyalahgunaan teknologi adalah judi *online* ini, sekarang judi pun beralih ketempat yang sedikit lebih elit, sekarang berjudi tidak harus sembunyi-sembunyi seperti dahulu, dengan duduk santai di depan komputer yang *online* pun kita sekarang bisa melakukan transaksi haram tersebut.

Kejahatan ini merupakan kejahatan yang banyak mempengaruhi mudah-mudi baik itu dari kalangan pelajar SMP, SMA bahkan MAHASISWA dan tak menutup kemungkinan orang tua juga terlibat dalam pengaruh tersebut. Atas

perbuatan tersebut pelaku judi *online* di jerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

Masalah perjudian sudah dikenal sejak lama sepanjang sejarah ditengah-tengah masyarakat. Sejak zaman dahulu, masalah perjudian merupakan suatu kenyataan atau gejala sosial, yang berbeda hanyalah pandangan hidup dan cara permainannya.

Allah SWT telah memperingatkan dengan tegas mengenai bahaya judi ini didalam QS. Al-Maidah/5 : 91.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

Terjemahnya :

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”¹

Harta yang di hasilkan dari perjudian ini termasuk menggunakan cara yang bathil (terlarang) dimana setiap sesuatu yang dilakukan dengan cara yang bathil maka hukumnya haram, harta yang di perolehnya jika untuk dipakai usaha itu berarti menggunakan modal yang dilarang oleh agama Islam, meskipun hal tersebut (harta dari hasil judi) dipergunakan di jalan Allah sekalipun, akan tetapi Allah tidak akan menerimanya.

Perjudian di dalam *networking*/internet adalah merupakan konten yang perlu di cegah, ditutup, atau dihilangkan dari seluruh jaringan internet yang

¹Kementrian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an (Al-Qur'an dan Terjemahan)* (Solo: PT. Tiga Serangkai, 2014), h. 123.

memasuki wilayah otoritas Indonesia, karna terdapat konten negatif didalamnya. Di Indonesia, yang dimaksud dengan *konten negatif* di internet adalah yang mengandung perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu tepatnya pada pasal 27 ayat 1 (kesusilaan), ayat 2 (perjudian).²

Saat ini teknologi internet memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk dari kehidupan anak pada saat ini. Internet bisa mempermudah mereka menyelesaikan tugas-tugasnya, tetapi dampak negatif dari internet juga tidak kalah besarnya dan tidak bisa di anggap remeh. Berhubung maraknya konten-konten negatif di internet, dibutuhkan peraturan atau pengawasan, sehingga mereka merasa diawasi ketika akan membuka situs-situs yang berbau negatif. Hukum yang diterapkan seringkali hanya sebagai permainan para mafia-mafia diarea perjudian, seakan mereka kebal terhadap hukum yang sekarang berlaku di indonesia. Bagaimana tidak? Sering mereka ditahan namun beberapa hari kemudian sudah duduk di meja judi kembali, tanpa melalui pemeriksaan yang cukup, layaknya pelaku tindak pidana perjudian.

Perjudian bisa dilakukan dalam berbagai bentuk termasuk penggunaan akses internet. Internet yang dikenal sebagai sebuah tempat untuk mencari data-data dalam memenuhi kebutuhan akan kehausan ilmu pengetahuan ternyata kini telah di manfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurut Stephen Hawking sebagaimana telah dikutip oleh Aswar Ardi, internet merupakan *big bang* kedua didunia, ditandai dengan adanya komunikasi *elektromagnetropis*

²Republik Indonesia, Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 1 dan 2 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, h.14.

via setelit maupun kabel oleh eksistensi jaringan telepon yang sudah ada dan akan segera didukung oleh ratusan setelit yang sedang dan akan diluncurkan.

Para pihak yang tidak bertanggung jawab, menggunakan kesempatan ini untuk memperoleh rezki meskipun lewat jalan yang tidak halal, yaitu mereka membuat sebuah *website* (sebuah alamat pada internet untuk memudahkan diakses) dimana didalamnya terdapat *home page* (halaman utama sebuah *website* yang memuat informasi singkat tentang isi dari *website*).

Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dan sebagai bentuk perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum positif di Indonesia, dan ini pun sudah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian, yang menyatakan bahwa semua bentuk perjudian merupakan tindak pidana.³

Sekalipun hiburan dan permainan itu dibolehkan oleh Islam. Tetapi ia juga mengharamkan setiap permainan yang dicampur perjudian, yaitu permainan yang tidak luput dari untung rugi yang dialami oleh sipemain. Oleh karna itu tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu lapang. Begitu juga tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun.

Sebagai contoh, sebagian orang yang suka bermain imc poker, isbobebe dan zinga poker sekedar untuk hiburan semata-mata. Namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut nantinya akan membawa kita kedalam bisikan iblis. Perlahan namun pasti nantinya akan menjerumuskan kita kedalam perjudian.

³Wanjiik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), h.69.

Perjudian itu juga dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara pemain-pemain itu sendiri. Sebab bagaimanapun akan selalu ada pihak yang menang dan yang kalah, yang dirampas dan yang merampas.

Hal diatas menunjukkan bahwa semakin berkembangnya teknologi, membuat para penjudi mempunyai seribu cara untuk melakukan tindak pidana tersebut tanpa harus duduk bersama-sama para penjudi lainnya, namun cukup dengan duduk di depan komputer dan menggunakan internet mereka sudah bisa melakukan judi *online*, bahkan jaringannya sampai keluar negeri. Hal ini jika dibiarkan terus menerus dan tidak ada hukum yang pasti untuk menjerat tindakan pidana ini, maka hal tersebut seolah-olah melegalkan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan elektronik atau “Perjudian Elektronik”.

Melihat pentingnya hukum untuk dapat mengatur hal-hal yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), yang disahkan pada tahun 2008 dimana pada salah satu pasal, yaitu tepatnya pasal 27 ayat 2 berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.⁴

Dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, adalah sebagai perbuatan yang dilarang, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan perbuatan yang disengaja dan tanpa hak, sebagaimana yang telah diundangkan

⁴Republik Indonesia, Undang-Undang RI. h.14.

dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalil pengharaman bermain judi menurut Islam, disejajarkan dengan minum khamar atau miras/alkohol. Kedua perbuatan maksiat tersebut tidak hanya dilakukan oleh kaum-kaum berkantong tebal saja, yang berkantong tipis atau berpenghasilan pas-pasan pun berpeluang jatuh kejurang dosa besar. Hanya saja mungkin berbeda kelas dalam bentuknya. Untuk itulah peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan serta solusi agar berhenti bermain judi *online* maupun judi biasa. Dengan judul “Analisis tindak pidana hukum islam terhadap judi *online* (Studi kasus desa lautang kec. Belawa kab. Wajo) ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada uraian sebelumnya, maka yang jadi pokok permasalahan yaitu bagaimana “Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi *Online* di Desa Lautang Kec. Belawa Kab. Wajo”.

Dari pokok permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan sub masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan perjudian *online* ?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan judi *online* di Desa Lautang Kec. Belawa Kab. Wajo ?
3. Apa upaya yang dilakukan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana judi *online* ?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, saya sebagai peneliti hanya akan berfokus pada Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi *Online*.

2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan fokus penelitian dari uraian sebelumnya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka penulis akan memaparkan pengertian beberapa variabel yang di anggap penting.

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menjadi kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditaksir maknanya.

Menurut Gorys Keraf, analisis adalah sebuah proses untuk memecahkan sesuatu kedalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya.

Tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.⁵

Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan dari pada tindakan. Menurut beliau “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”⁶

⁵D Simoons dalam Sudarto, *Huku Pidana I* (Semarang :Yayasan Sudarto, 1990), h.41.

⁶Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.63.

Hukum Islam (syari'at Islam) adalah Hukum syara' menurut Ulama usul ialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir).

Sedangkan menurut Ulama fiqih syara adalah hukum yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.

Judi *online* adalah permainan yang dilakukan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan dan permainan judi *online* melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

D. Kajian Pustaka

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi *Online*, agar nantinya pembahasan ini fokus pada pokok kajian maka saya sebagai peneliti melengkapi dengan beberapa literatur diantaranya sebagai berikut:

1. Muslan Abdurrahman dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, mengutip perkataan Lawrence M. Friedman. Mengemukakan bahwa ada 3 koponen hukum, yaitu struktual hukum, subtansi hukum dan budaya hukum. Struktual hukum adalah aparat penegak hukum dalam arti luas. Subtansi huku adalah norma-norma hukum, sedangkan budaya hukum adalah sikap tindak masyarakat terhadap hukum yang berlaku.⁷

⁷Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), h. 46.

2. Soetandyo Wignjosobroto dalam bukunya yang berjudul *Dialiktika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Mengutip perkataan Lawrence M. Friedman. Mengemukakan bahwa deskripsi 3 (tiga) unsur hukum meliputi struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi hukum diibaratkan sebagai apa yang di kerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan.⁸
3. Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, mengemukakan bahwa dalam penegakan hukum harus memperhatikan tujuan pemidanaan dengan memperhatikan keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana.⁹
4. Sudikno Martokusumo dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Mengemukakan bahwa hukum harus dilaksanakan dan di tegakkan, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, hal ini dilakukan dalam rangka memberi perlindungan kepentingan manusia, maka pelaksanaan hukum harus dilakukan secara normal dan damai.¹⁰

⁸Soetandyo Wingnjosoebroto, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), h. 93-94.

⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: CP. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 98.

¹⁰Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 2003), h. 160-161.

Dari beberapa penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan judul yang sama tetapi terdapat sedikit pembahasan yang sama. Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi *Online*. Hal inilah yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sehingga akan lebih terarah serta dapat mengenai sasarannya, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan perjudian *online*.
- b. Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari judi *online* dimasyarakat Desa Lautang, Kecamatan Belawa.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan serta memperkaya ilmu/pengetahuan hukum pidana Islam khususnya, dalam rangka penanggulangan tindak pidana judi *online*.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan mampu memberikan informasi dan nilai tambah, terhadap pembaca dan para penulis atau bahkan dapat dijadikan bahan perbandingan

dengan penelitian selanjutnya, terkait dengan analisis tindak pidana hukum Islam terhadap judi *online*.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Perjudian Online*

1. Pengertian Perjudian

Kata “perjudian” sebagai salah satu *jarimah* dalam *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, berarti *maizir* atau *khomarun*,¹ sedangkan dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, judi adalah permainan dengan bertaruh uang (seperti main dadu, main kartu dan sebagainya). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan.² Kaitannya dengan Islam perjudian masuk dalam *jarimah ta'zir*.

Menurut bahasa, *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata “*'azzara*” yang berarti menolak dan mencegah kejahatan.³ Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun *qishasnya*.⁴ *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum *had*, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.⁵

¹Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 1155.

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 479.

³A. Jazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 14.

⁴Masrum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: FH UII, 1991), h. 139.

⁵Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud-Diniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam*

Ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, *jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).

Menurut Yusuf Qardawi, Setiap permainan yang ada unsur perjudiannya adalah haram, perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian.⁶

Beberapa definisi tersebut sebenarnya saling melengkapi, sehingga darinya dapat disimpulkan sebuah definisi judi yang menyeluruh. Jadi, judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan (harta/materi) dimana pihak yang menang mengambil harta/materi dari pihak yang kalah. Dengan demikian, dalam judi terdapat tiga unsur:

1. adanya taruhan harta/materi (yang berasal dari kedua pihak yang berjudi).
2. ada suatu permainan, yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah.
3. pihak yang menang mengambil harta(sebagian/seluruhnya/kelipatan) yang menjadi taruhan (*murahanah*),sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

Takaran Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 457.

⁶Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2007), h. 423.

2. Dasar Hukum Hukum Perjudian

Judi dalam Agama Islam jelas-jelas dilarang, selain itu dosa yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar, berdasarkan firman Allah didalam QS. Al-Baqarah/2 : 219.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَةَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۚ ۲۱۹﴾

Terjemahnya :

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”⁷

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan dilarangnya para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial.⁸ Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai

⁷Kementrian Agama RI, Syaamil Al-Qur'an (Al-Qur'an dan Terjemahan), h. 34.

⁸A. Jazuli, Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), h. 25.

dengan konsep tujuan Syari'at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.

Maizir yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah yang karenanya ayat Al-Qur'an itu diturunkan, menurut kitab-kitab tafsir disebutkan sebagai berikut: "Sebanyak sepuluh orang bermain kartu yang dibikin dari potongan kayu (karena waktu itu belum ada kertas)".

3. Macam-macam Perjudian

Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan judi dan menuntut ketekunan serta keterampilan dalam berjudi. Umpamanya pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola bisa menjadi obyek judi. Juga pacuan-pacuan misalnya: pacuan kuda, anjing balap, biri-biri dan karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan sesudah bekerja. Dikemudian hari ditambahkan elemen pertaruhan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi:⁹

a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:

1. Roulette
2. Blackjack
3. Bacarat
4. Creps
5. Keno
6. Tombala
7. Super Ping-Pong
8. Lotto Fair
9. Satan
10. Paykyu
11. Slot Machine (Jackpot)
12. Ji Si Kie
13. Big Six Wheel
14. Chuc a Cluck
15. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan
16. Yang berputar (Paseran)
17. Pachinko
18. Poker
19. Twenty One
20. Hwa-Hwe

⁹Republik Indonesia, Undang-Undang RI. Pasal 1 Ayat 1 Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

21. Kiu-Kiu

b. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:

1. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak
2. Lempar gelang
3. Lempar uang (coin)
4. Koin
5. Pancingan
6. Menebak sasaran yang tidak berputar
7. Lempar bola
8. Adu ayam
9. Adu kerbau
10. Adu kambing atau domba
11. Pacu kuda
12. Kerapan sapi
13. Pacu anjing
14. Hailai
15. Mayong/Macak
16. Erek-erek.

c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:

1. Adu ayam
2. Adu sapi

3. Adu kerbau
4. Pacu kuda
5. Karapan sapi
6. Adu domba atau kambing
7. Adu burung merpati

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian.

Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

4. Perjudian Ditinjau dari Hukum Pidana

Salah satu syarat untuk hidup sejahtera dalam masyarakat adalah tunduk kepada tata tertib atas peraturan di masyarakat atau negara, kalau tata tertib yang berlaku dalam masyarakat itu lemah dan berkurang maka kesejateraan dalam masyarakat yang bersangkutan akan mundur dan mungkin kacau sama sekali.

Untuk mendapatkan gambaran dari hukum pidana, maka terlebih dahulu dilihat pengertian dari pada hukum pidana. Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, "Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang dasar aturannya untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁰

Dikatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, karena di samping hukum pidana itu masih ada hukum-hukum yang lain misalnya hukum perdata, hukum tata negara, hukum tata pemerintahan dan sebagainya.

Membicarakan masalah hukum pidana tidak lepas kaitannya dengan subjek yang dibicarakan oleh hukum pidana itu. Adapun yang menjadi subjek dari hukum pidana itu adalah manusia selaku anggota masyarakat. Manusia selaku subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban di dalam menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat tidak jarang menyimpang dari norma yang ada. Adapun penyimpangan itu berupa tingkah laku yang dapat digolongkan dalam pelanggaran dan kejahatan yang sebetulnya dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, masyarakat menjadi resah, aktivitas hubungannya menjadi terganggu, yang menyebabkan didalam masyarakat tersebut sudah tidak dapat lagi ketertiban dan ketentraman.

¹⁰Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, h. 1.

Sebagaimana diketahui secara garis besar adanya ketertiban itu dipenuhi oleh adanya peraturan atau tata tertib, ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tata tertib ini dalam kaidah atau norma yang tertuang posisinya didalam masyarakat sebagai norma hukum. Dengan adanya tatanan norma tersebut, maka posisi yang paling ditekankan adalah norma hukum, meskipun norma yang lain tidak kalah penting perannya dalam kehidupan masyarakat.

Untuk mewujudkan tertib sosial, negara menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat. Peraturan-peraturan itu mempunyai sanksi hukum yang sifatnya memaksa. Artinya bila peraturan itu sampai dilanggar maka kepada pelanggarnya dapat dikenakan hukuman. Jenis hukuman yang akan dikenakan terhadap si pelanggar akan sangat tergantung pada macamnya peraturan yang dilanggar. Pada prinsipnya setiap peraturan mengandung sifat paksaan artinya orang-orang yang tidak mau tunduk dan dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut.

Perjudian yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut:

1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.¹¹

Larangan-larangan perjudian dalam KUHP sekarang ini adalah seperti berikut: Permainan judi pertama-tama diancam hukuman dalam Pasal 303 KUHP yang bunyinya:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpamendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu.
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

¹¹Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bumi Aksara, 2006), h. 185.

2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
3. Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa pemberatan ancaman pidana terhadap bandar judi dan pemain yang ikut judi tampak niat pembentuk undang-undang itu dari pihak pemerintah, sehingga dapat dikatakan pemerintahlah yang mempunyai niat baik itu.

Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti yang dimaksud, untuk itu dapat dikenal sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai dengan hukum acara pidana. Dalam kenyataannya bahwa judi tumbuh dan berkembang serta sulit untuk ditanggulangi, diberantas seperti melakukan perjudian di depan umum, dipinggir jalan raya bahkan ada yang dilakukan secara terorganisir dan terselubung dan beraneka ragam yang dilakukan oleh para penjudi tersebut yang sebenarnya dilarang.

B. Judi Online Ditinjau dari Norma Agama

Negara Indonesia adalah negara Pancasila, agama merupakan salahsatu fundamen yang penting dan pokok. Hal ini terlihat dalam urutan sila-sila Pancasila dimana Ketuhanan Yang Maha Esa berada dalam urutan pertama. Mendapat tempat dan kedudukan yang tinggi seperti yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 45 alinea ke IV juga terdapat dalam Pasal 29:

- a. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹²

Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah bukan merupakan negara sekuler, yang berdasarkan atas suatu agama tertentu melainkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (sila pertama Pancasila juga Pasal 29 ayat (1) UUD 45). Dikatakan termasuk bukan negara sekuler, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan negara RI tidak memisahkan sama sekali urusan kenegaraan dengan urusan keagamaan, terbuka dengan adanya departemen (kementrian) agama di dalam susunan pemerintahannya.

Agama merupakan sumber kepribadian bangsa di dalam pelaksanaannya harus dijalankan dan ditaati. Hal itu bertujuan agar tidak menyimpang dari norma yang ada di dalam agama tersebut. Kenyataan di dalam hidup ini orang tidak jarang menyimpang dari norma agama, hal itu disebabkan oleh kurangnya iman terhadap seseorang yang akhirnya dapat menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

¹²Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar RI 1945 Surabaya: Arloka, 2002.

Dilihat dari sanksinya bahwa norma agama merupakan perintah dari Tuhan maka terhadap pelanggaran tersebut akan mendapat sanksi diakhirat kelak. Jadi di dunia ini kurang dapat dirasakan, untuk itu terhadap orang yang kurang imannya tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik tetapi bagi orang yang mempunyai iman hal itu tidak akan terjadi karena kepercayaan bahwa walaupun bagaimana sanksi tersebut pasti dirasakan pada hari akhirat nanti.

Allah telah memperingatkan dengan tegas mengenai bahaya judi ini didalam QS. Al-Maidah/5 : 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Terjemahnya:

”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”¹³

Sudah jelas bahwa dari segi norma agama dalam hal ini agama Islam melarang umatnya bermain judi kemudian agama-agama lainnya pun juga demikian sebab dari adanya permainan judi tersebut menyebabkan permusuhan antara sesama umat manusia yaitu saling dendam dan iri hati dan dari adanya perbuatan judi tersebut akan membuat harta benda menjadi mubazir, tidak halal. Harta benda yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk cara yang terlarang, dan apabila harta dimakan berarti ia memakan barang haram, bila dipakai untuk usaha berarti juga menggunakan modal yang dilarang oleh Islam dan jika hal tersebut dibelanjakan di jalan Allah, maka Allah juga tidak akan menerimanya.

¹³Kementrian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an (Al-Qur'an dan Terjemahan)*,h.123.

1. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan daripada tindakan. Menurut beliau “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”¹⁴

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah:

- a. Kelakutan dan akibat (=perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.¹⁵

Lebih lanjut dalam penjelasan mengenai perbuatan pidana terdapat syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dari perbuatan pidana adalah adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP, sedangkan syarat materiil adalah perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicitakan oleh masyarakat.

Pakar hukum pidana D. Simmons menyebut tindak pidana dengan sebutan *Straf baar Feit sebagai, Een strafbaar gestelde onrecht matige, met schuld ver*

¹⁴Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, h. 63

¹⁵Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, h. 63

bandstaande van een teori keningsvat baar person. Tindak pidana menurut Simmons sebagaimana dikutip oleh Sudarto, terbagi atas dua unsur yakni:¹⁶

- a. Unsur obyektif terdiri dari:
 1. Perbuatan orang.
 2. Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut.
 3. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.
- b. Unsur subyektif:
 1. Orang yang mampu untuk bertanggung jawab.
 2. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.

Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Moeljanto, “*Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan suatu kesalahan”.¹⁷

Peran hukum terasa sekali dalam mewarnai tata kehidupan bermasyarakat. Dengan wibawa dan daya gunanya itu semakin berperan serta dalam upaya menstrukturisasi kehidupan sosial, sehingga struktur kehidupan sosial masyarakat dapat diubah dan dikembangkan ke arah kehidupan bersama yang lebih maju, lebih menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bersama yang berkeadilan yang menjadi tujuan hidup bersama dalam bermasyarakat.

Berkaitan dalam masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele.

¹⁶D Simoons dan Sudarto, *Hukum Pidana Islam*, h.41.

¹⁷Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, h. 56.

Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.

Erwin Mapaseng dalam sebuah dialog mengenai upaya pemberantasan perjudian mengatakan bahwa:

“Praktek perjudian menyangkut banyak pihak, polisi tidak bisa menangani sendiri. Sebagai contoh praktek permainan ketangkasan, izin yang dikeluarkan dibahas bersama oleh instansi terkait. Lembaga Kepolisian hanya salah satu bagian dari instansi yang diberi wewenang mempertimbangkan izin tersebut. Dalam persoalan ini, polisi selalu dituding hanya mampu menangkap bandar kelas teri. Padahal masyarakat sendiri tidak pernah memberikan masukan kepada petugas untuk membantu penuntasan kasus perjudian”¹⁸

Judi *online* ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya. Ancaman hukuman yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.

2. Sanksi Hukum Perjudian

¹⁸Erwin Mapaseng, “Upaya Pemberantasan Perjudian”, Harian Kompas, 29 Maret 2017.

Sanksi pidana pada Pasal 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1974 belum mengakomodasi norma hukum Islam dan pelanggaran terhadap pasal tersebut dianggap persoalan duniawi, perlu memasukan norma-norma Islam tentang *maisir*.

Maisir/judi adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam Al-Qur'an. Para fuqaha tidak menempatkan perjudian sebagai salah satu pembahasan dalam delik pidana, jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *jarimah ta'zir*.

Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *jarimah ta'zir*.¹⁹

Jarimah ta'zir itu jumlahnya sangat banyak sekali, yaitu semua *jarimah* selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas diyat* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua: Pertama, *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nash* Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. Syara' hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja.²⁰

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Syari'ah hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai

¹⁹Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 92 -93.

²⁰Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: FH UII, 1991), h.140.

jarimah; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya.

Sedangkan sebagian *jarimah ta'zir* diserahkan pada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nash-nash* (ketentuan syara') dan prinsip-prinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.²¹

Perbedaan antara *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh syara' dengan *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa ialah kalau *jarimah ta'zir* macam pertama tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga, akan tetapi *jarimah ta'zir* macam yang kedua bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.²²

Para Imam Mazhab berpendapat bahwa hukuman *ta'zir* berbeda-beda menurut perbedaan sebab perbuatannya. Mazhab Hanafi dan Syafi'I mengatakan bahwa *ta'zir* yang paling tinggi adalah sejumlah *had* yang paling rendah. Adapun serendah-rendahnya *ta'zir*, menurut pendapat Hanafi, adalah 40 kali dera jika penyebabnya adalah meminum khamar/Berjudi. Sedangkan menurut Syafi'I dan Hambali serendah-rendahnya 20 kali dera. Setinggi-tingginya hukuman *ta'zir*, menurut Hanafi adalah 39 kali dera. Sedangkan menurut Syafi'I dan Hambali

²¹Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 9.

²²Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 9.

adalah 19 kali dera. Sedangkan menurut Maliki mengatakan bahwa Hakim boleh melakukan *ta'zir* sebanyak yang menjadi pertimbangannya.²³

Jadi dapat saya simpulkan bahwa segala sesuatu yang mengandung unsur kerugian bagi diri sendiri atau orang lain itu hukumnya haram dan sanksinya dapat di putuskan berdasarkan tingkat jarimah yang dilakukan.

Hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang dijatuhkan atas *jarimah-jarimah* yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum syari'at yaitu *jarimah hudud* dan *jarimah diyat*. Hukuman tersebut banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang sangat ringan sampai yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya.²⁴

Para ulama telah menyusun jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku *jarimah ta'zir*. Jenis hukuman tersebut adalah hukuman kawalan (kurungan), *jilid* (dera), pengasingan, pengucilan, ancaman, teguran, dan denda.²⁵

- a. Hukuman Kawalan (Kurungan) Hukuman kawalan dalam syari'at Islam, yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas (terbatas atau tidak terbatas di sini adalah dari segi waktu).²⁶ Batas terendah dari hukuman ini satu hari, sedang batas setinggi-tingginya tidak menjadi kesepakatan. Ulama-ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertinggi satu tahun, karena

²³Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilaf Al-A'Immah*, Terj. Abdullah zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2015) h. 450-451.

²⁴Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 299.

²⁵Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, h. 143.

²⁶Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 158.

mereka mempersamakan dengan pengasingan dalam zina.²⁷ Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan itu tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat sampai baik pribadinya.

- b. Hukuman Jilid Hukuman *jilid* merupakan hukuman yang pokok dalam syari'at Islam, di mana untuk *jarimah-jarimah hudud* sudah tertentu jumlahnya, misalnya 100 kali untuk zina dan 80 kali untuk *qazaf*, sedang untuk *jarimah ta'zir* tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk *jarimah ta'zir* yang berbahaya hukuman *jilid* lebih diutamakan.²⁸

Dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 219, Allah SWT menjelaskan bahwa khamar dan *Al-Maysir* mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia. akan tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Manfaat yang dimaksud ayat itu, khususnya mengenai *Al-Maysir*, adalah manfaat yang hanya dinikmati oleh pihak yang menang, yaitu beralihnya kepemilikan sesuatu dari seseorang kepada orang lain tanpa usaha yang sulit. Kalaupun ada manfaat atau kesenangan lain yang ditimbulkannya, maka itu lebih banyak bersifat manfaat dan kesenangan semu. Al-Alusiy²⁹ menyebutkan beberapa di antaranya, yaitu kesenangan kejiwaan, kegembiraan yang timbul dengan hilangnya ingatan dari segala kelemahan (aib), ancaman bahaya dan kesulitan hidup.

Pada bentuk permainan *al-mukhatharah*, pihak yang menang bisa memperoleh harta kekayaan yang dijadikan taruhan dengan mudah dan bisa pula menyalurkan nafsu biologisnya dengan isteri pihak yang kalah yang juga

²⁷Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 308.

²⁸Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 205.

²⁹Haryanto, *Indonesia Negri Judi* (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 61.

dijadikan sebagai taruhan. Sedang pada bentuk *al-tajzi`ah*, pihak yang menang merasa bangga dan orang-orang miskin juga bisa menikmati daging unta yang dijadikan taruhan tersebut. Akan tetapi, *Al-Maysir* itu sendiri dipandang sebagai salah satu di antara dosa-dosa besar yang dilarang oleh agama Islam.

Penegasan yang dikemukakan pada surah Al-Baqarah (2) ayat 219 bahwa dosa akibat dari *Al-Maysir* lebih besar daripada manfaatnya memperjelas akibat buruk yang ditimbulkannya. Di antara dosa atau risiko yang ditimbulkan oleh *Al-Maysir* itu dijelaskan dalam surah Al-Maidah (5) ayat 90 dan 91. Kedua ayat tersebut memandang bahwa *Al-Maysir* sebagai perbuatan setan yang wajib di jauhi oleh orang-orang yang beriman. Disamping itu, *Al-Maysir* juga dipergunakan oleh setan sebagai alat untuk menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, terutama para pihak yang terlibat, serta menghalangi konsentrasi pelakunya dari perbuatan mengingat Allah dan menunaikan shalat.

Diantara *mayzir* yang disepakati haramnya (Haram) diatas. Ada pula *mayzir* yang tidak disepakati haramnya (Halal). Para Ulama berselisih pandangan mengenai permainan yang tidak melibatkan pertaruhan uang, akan tetapi memerlukan permainan berfikir dan menilai, samahalnya haram atau tidak. Secara umum para Imam Mazhab berbeda pandangan terhadap *mayzir* yang diharamkan maupun dengan *mayzir* yang dihalalkan, diantaranya yaitu:³⁰

- a. Hanafi berpendapat permainan itu asal nya haram, kecuali empat jenis: lomba kuda, lomba untah dan permainan antara suami istri.

³⁰Muh Rahmat Hakim Sopalatu, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi *Online*", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017) h. 33-34.

- b. Maliki berpendapat sama halnya dengan pandangan Hanafi. Imam Malik dilaporkan membenci permainan catur dan melarangnya (Haram).
- c. Syafi'I berpendapat bahwa semua permainan yang bergantung kepada pengiraan, pemikiran dan perancangan strategi tidak dilarang akan tetapi hukumnya makruh, dengan syarat tidak ada taruhan, percakapan yang buruk atau melalaikan dari shalat.
- d. Hambali berpendapat bahwa seluruh permainan yang tidak ada taruhan harta selagimana tidak mengandung mudharat atau melalaikan dari perkara yang fardu pada asalnya harus.

Menurut Ibn Taymiyah,³¹ Syari' melarang riba karena di dalamnya terdapat unsur penganiayaan terhadap orang lain. Sedang larangan terhadap judi juga didasarkan pada adanya kezaliman dalam perbuatan tersebut. Riba dan judi diharamkan Al-Qur'an karena keduanya merupakan cara penguasaan atau pengalihan harta dengan cara yang batil. Oleh karena itu, segala jenis kegiatan mu'amalah yang dilarang Rasulullah SAW, seperti jual beli gharar, jual beli buahan yang belum sempurna matangnya, dan sebagainya, bisa termasuk dalam kategori riba dan juga termasuk dalam kategori judi (spekulasi).

Lebih lanjut, Ibn Taymiyyah.³² menjelaskan bahwa ada dua *mafsadah* yang terdapat di dalam judi, yaitu *mafsadah* yang berhubungan dengan harta dan *mafsadah* yang berhubungan dengan perbuatan judi itu sendiri. *Mafsadah* yang berhubungan dengan harta adalah penguasaan harta orang lain dengan cara yang batil. Sedang *mafsadah* yang berhubungan dengan perbuatan, selain tindakan

³¹Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, h. 61.

³²Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, h. 63.

penguasaan itu sendiri, adalah *mafsadah* yang bersifat efek samping yang ditimbulkannya terhadap hati (jiwa) dan akal. Sementara masing-masing dari kedua *mafsadah* itu memiliki larangan secara khusus. Secara tersendiri, penguasaan terhadap harta orang lain dilarang secara mutlak, walaupun tindakan itu dilakukan bukan dengan cara perjudian, seperti larangan memakan riba. Sedang terhadap tindakan yang melalaikan dari mengingat Allah dan shalat, serta tindakan yang menimbulkan permusuhan juga dilarang, walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan cara menguasai harta orang lain dengan cara yang batil, seperti meminum khamar. Oleh karena di dalam judi itu terdapat dua *mafsadah* sekaligus, maka pengharamannya juga lebih kuat dibanding riba dan minum khamar. Oleh karena itu jugalah pengharaman judi itu lebih dulu dibanding pengharaman riba. Beliau juga menegaskan bahwa dari berbagai aspeknya, pengharaman judi mencakup unsur-unsur yang menjadi sebab diharamkannya riba dan meminum khamar.

Al-Qurthubiy³³ menceritakan bahwa 'Umar menerapkan hukuman (hadd) dengan cambukan berkali-kali dan mengasingkan peminum khamar, Muhjan al-Tsaqafiy, yang secara sengaja dan membangga-banggakan perbuatannya. Padahal Muhjan termasuk salah seorang anggota pasukan umat Islam yang sangat pemberani. Ia diasingkan 'Umar dan baru dibolehkan kembali ke Madinah ketika ia sudah tobat dan ia pun ikut dalam peperangan Qadisiyah. Pada waktu itu ia bersumpah tidak akan meminum khamar lagi selama-lamanya.

³³Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, h. 63.

Al-Alusi.³⁴ menjelaskan bahwa kemudaratannya yang dapat ditimbulkan oleh perjudian antara lain, selain perbuatan itu sendiri merupakan cara peralihan (memakan) harta dengan cara yang batil, adalah membuat para pecandunya memiliki kecenderungan untuk mencuri, menghancurkan harga diri, menyia-nyiakan keluarga, kurang pertimbangan dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, berperangai keji, sangat mudah memusuhi orang lain.

Semua perbuatan itu sesungguhnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang sangat tidak disenangi orang-orang yang berfikir secara sadar (normal), tapi orang yang sudah kecanduan dengan judi tidak menyadarinya, seolah-olah ia telah menjadi buta dan tuli. Selain itu, perjudian akan membuat pelakunya suka berangan-angan dengan taruhannya yang mungkin bisa memberikan keuntungan berlipat ganda.

Kebiasaan suka berangan-angan atau panjang angan-angan memberikan dampak negatif yang sangat banyak. Kebiasaan seperti itu sangat dikhawatirkan Nabi terjadi pada dirinya dan pada umatnya.

Pernyataan kekhawatiran Nabi, khusus tentang panjang angan-angan, dalam hadis itu hanya diikuti oleh satu alasan, yaitu "akan membuat lupa kepada akhirat". Namun demikian, para intelektual muslim memberikan penjelasan yang cukup rinci, dari kacamata psikologis, tentang dampak negatif panjang angan-angan itu. Menurut al-Fadhil bin 'Iyadh, di samping empat sifat kejiwaan lainnya, panjang angan-angan merupakan pertanda bahwa si pemiliknya (akan) mengalami hidup susah (celaka). Hal itu terlihat dari pernyataannya berikut. Ada lima

³⁴Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, h. 64.

pertanda hidup susah, yaitu hati yang sesat, mata yang kaku (picik), kurang rasa malu, sangat mencintai dunia, dan panjang angan-angan.

Sedangkan menurut Al-Qasim, panjang angan-angan adalah penyebab dari semua jenis kemaksiatan manusia. Lengkapnya pernyataan Al-Qasim tersebut adalah sebagai berikut. Fondasi cinta adalah pengetahuan. Fondasi taat adalah pembenaran. Fondasi khawf (ketakutan kepada Allah) adalah pendekatan diri kepada-Nya. Sumber kemaksiatan adalah panjang angan-angan. Dan kecintaan kepada kekuasaan adalah sumber dari semua bencana (politik).³⁵

Al-Ashbihaniy.³⁶ menyebutkan beberapa dampak lain yang sangat fatal dari sifat panjang angan-angan ini. Di antaranya adalah mendorong palakunya malas berusaha tapi sangat berharap pada sesuatu yang dijanjikan, takut kepada makhluk tapi tidak takut kepada Allah, berlindung kepada Allah dari (aniaya) orang yang ada di atasnya (lebih kuat atau lebih kuasa) tapi tidak berlindung kepada Allah terhadap orang yang ada di bawahnya, takut mati tapi tidak berupaya memaknainya, mengharapkan manfaat ilmu tapi tidak mengamalkannya, sangat yakin pada keburukan (kemudharatan) kebodohan dan mencela orang yang melakukannya tapi tidak sadar bahwa ia juga sesungguhnya dalam hal yang sama, selalu melihat orang yang lebih, dalam hal harta tapi melupakan orang yang berkekurangan, takut kepada orang lain karena kesalahan terbesar yang dilakukannya tapi mengharapkan manfaat dengan amal paling ringan yang dilakukannya. Masih sangat banyak dampak negatif dari sifat ini, yang semuanya

³⁵Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, h. 65.

³⁶Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, h. 67.

memberikan kesimpulan bahwa adalah logis kalau Allah dan Rasul-Nya mengharamkan judi dengan segala jenisnya.

Dengan pertimbangan rasional saja, karena sedemikian besarnya bahaya yang ditimbulkannya, mestinya perjudian tersebut sudah harus ditinggalkan dan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang. Sehubungan dengan ini, al-Sathibiy³⁷ menjelaskan bahwa karena bahaya yang terdapat pada judi (dan khamar) jauh lebih besar daripada manfaatnya, maka ditinggalkanlah hukum yang sesuai dengan kemaslahatan dan pekerjaan tersebut hukumnya menjadi haram. Hal itu sejalan dengan kaidah syar'iyah yang mengatakan Jika (dalam satu kasus) kemudahan lebih dominant daripada masalah, maka hukum memihak kepada kemudahan.

Untuk substansi yang sama, al-Alusiy³⁸ mengemukakan formulasi kaidah yang sedikit berbeda dengan yang dikemukakan oleh al-Sathibiy. Al-Alusiy mengatakan sebagai berikut Sesungguhnya apabila mafsadah lebih dominan daripada mashlahah, maka perbuatan tersebut ditetapkan haram hukumnya.

C. Judi Online dalam Pandangan Masyarakat

Kasus judi *online* ataupun perjudian dari hari ke hari semakin marak. Masalah judi *online* ataupun perjudian merupakan masalah klasik yang menjadi kebiasaan yang salah, bagi umat manusia. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada hakekatnya judi *online* maupun perjudian jelas-jelas

³⁷Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, h. 67.

³⁸Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, h. 68.

bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi dari dunia luar dengan memanfaatkan kemajuan fasilitas teknologi informasi dan sebagai dampak langsung globalisasi dalam era reformasi maka pengaruh buruk terhadap sesuatu hal secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang taraf pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah. Sebagai dampaknya jalan pintas untuk memperoleh sesuatu bukan hal yang diharapkan lagi, termasuk judi *online* dan perjudian.

Secara psikologis, manusia Indonesia memang tidak boleh dikatakan pemalas, tapi memang agak sedikit manja dan lebih suka dengan berbagai kemudahan dan mimpi-mimpi yang mendorong perjudian semakin subur. Dari sisi mental, mereka yang terlibat dengan permainan judi *online* ataupun perjudian, mereka akan kehilangan etos dan semangat kerja sebab mereka menggantungkan harapan akan menjadi kaya dengan berjudi.

Seorang Antropologi dari Universitas Diponegoro Semarang, Nurdin H. Kistanto, mengatakan “Sangat sulit untuk mampu memisahkan perilaku judi dari masyarakat kita. Terlebih orang Indonesia atau orang Bugis Belawa khususnya judi telah benar-benar mendarah daging”³⁹

Dalam keseharian banyak sekali orang Bugis Belawa yang tidak tahu besok makan apa, hal itu sudah merupakan bentuk judi dengan nasib. Aspek kultural tersebut menurut beliau yang semakin menyuburkan perjudian. Dari sisi

³⁹Nurdin H. Kistanto, *Kebiasaan Masyarakat Berjudi* (Harian Kompas, Minggu, 4 November 2016), hlm. 8.

budaya juga demikian, telah lama dikenal bentuk-bentuk judi *online*. pertama judi domino yang dimainkan dengan menggunakan 28 kartu yang tersedia. Bermain judi domino ini membutuhkan strategi khusus dan juga memiliki akhir yang fantastis. Kedua judi casino *online* yang dimainkan selayaknya seperti nyata atau *offline* dengan lokasi yang nyata. Ketiga judi poker *online* yang tersedia dalam bentuk *online* dan dibuat sangat mirip dengan aslinya. Keempat qiu-qiu cara kerjanya hampir sama dengan poker domino akan tetapi dalam pembagian kartunya kita dibagikan 2 kartu pertama dan putaran kedua kita diberikan 4 kartu. Yang kelima Bandar qiu cara kerjanya hampir sama dengan qiu-qiu akan tetapi yang membedakannya adalah kita diberikan 2 kartu dalam 1 putaran. Bentuk-bentuk judi dan perjudian tersebut dimainkan oleh rakyat jelata sampai menengah dan dari kalangan atas yang mempunyai kedudukan dan status terhormat.

Kemudian varian judi dan perjudian semakin menunjukkan peningkatan setelah masuknya kebudayaan Cina yang menawarkan kartu sebagai alat bantu untuk perjudian. Akibatnya judi atau perjudian menjadi sejenis ritual dalam masyarakat. Secara teknis perjudian merupakan hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Dengan infrastruktur yang murah dan mudah didapat orang bisa melakukan perjudian kapan saja, mulai dari kartu, dadu, nomor sampai pada menebak hasil pertandingan sepak bola, tinju atau basket di televisi ataupun radio.

Metode penjualan dan penyebaran judi atau perjudian semakin bervariasi, sebagai contoh yang paling banyak diminati jenis togel (toto gelap) yakni semacam undian SDSB atau porkas (dulu), tapi nomornya lebih sedikit, yaitu 4 nomor tebak, atau 2 nomor tebak terakhir yang sering disebut BT

(buntur/ekor), atau bisa juga 1 nomor tebakkan (goyang atau colok) yang bisa keluar di urutan mana saja.

Judi togel penyebarannya ada yang secara terang-terangan membuka di rumahnya, dengan menempelkan hasil atau angka yang keluar secara mencolok, kemudian secara berkeliling dari pintu ke pintu menawarkan, dan cara terakhir biasanya para pembeli menghubungi pengecer lewat telepon.

Bagi mereka yang terlibat langsung dengan perjudian akan cenderung berpikir negatif dan tidak rasional. Bahkan tidak mungkin akan memicu pada tindak kriminal yang lebih besar. Dari segi perilaku masyarakat juga mudah ditebak, mereka ini cenderung mengisolasi diri dan mencari komunitas yang sejalan dengan mereka. Dengan demikian mungkin judi sudah merupakan penyakit sosial yang usianya sebaya dengan kelahiran manusia dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia.

Beberapa contoh permainan seperti tersebut di atas, maka jelaslah apa yang sebenarnya yang dimaksud pengertian judi oleh masyarakat, yaitu setiap permainan atau perbuatan yang sifatnya untung-untungan atau dengan mempergunakan uang atau barang sebagai taruhannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat penulis simpulkan, bahwa permainan judi menurut masyarakat, mengandung unsur yang meliputi:

- 1) Ada permainan atau perbuatan manusia.
- 2) Bersifat untung-untungan atau tidak.
- 3) Dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya Jadi yang dikatakan judi, harus memenuhi tiga unsur tersebut di atas.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus.¹ Penelitian ini menginterpretasikan atau menterjemahkan dengan bahasa penelitian tentang hasil penelitian yang diperoleh dari informan di lapangan sebagai wacana untuk mendapatkan penjelasan tentang kondisi yang ada hubungannya dengan variabel-variabel dan selanjutnya akan dihasilkan deskripsi tentang objek penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis akan berusaha mendeskripsikan atau menganalisis tentang bagaimana pandangan masyarakat. Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Tentang Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi *Online*.

Oleh sebab itu, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang utuh tentang kompetensi-kompetensi tertentu, dengan tujuan penulis ingin memperoleh pemahaman dibalik fenomena yang berhasil didapat oleh penulis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Lokasi ini dipilih oleh penulis karena didasarkan pada

¹Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Bima Aksara, 1986), h. 198.

pertimbangan bahwa tempat tersebut memiliki kaitan dan tujuan yang tepat bagi peneliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah filosofis normatif. Pendekatan filosofis normatif merupakan cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formanya. Dengan kata lain, pendekatan filosofis normatif adalah upaya sadar yang dilakukan untuk menjelaskan apa dibalik sesuatu yang tampak.²

C. Sumber Data

1. Data Primer

Merupakan pengumpulan data yang secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh. Data primer merupakan informasi yang diperoleh dari responden yang diperoleh dari pandangan masyarakat Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, melalui sebuah wawancara yang dilakukan secara langsung serta observasi langsung yang ditemukan penulis di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Data sekunder diperoleh dalam bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan

²Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*; Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, h. 18.

berbagai informasi yang dikeluarkan berbagai instansi, perusahaan atau berbagai jurnal dan penelitian lain yang telah dilaksanakan sebelumnya.³

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, jenis data yang dikumpulkan yaitu data kualitatif. Data yang dikumpulkan bersumber dari data primer yang didapatkan setelah penelitian serta data sekunder sebagai penunjang dalam hal ini beberapa sumber referensi (buku-buku dan lain sebagainya yang relevan).

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dengan jalan turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung guna mendapatkan data yang lebih jelas.⁴ Observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Dalam pelaksanaan observasi ini penulis menggunakan alat bantu untuk memperlancar observasi di lapangan yaitu buku catatan sehingga seluruh data-data yang diperoleh di lapangan melalui observasi ini dapat langsung dicatat.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah salah satu teknik untuk mendapatkan informasi dengan bertanya jawab secara langsung dengan responden yang bersangkutan secara terbuka berkaitan dengan pembahasan penelitian ini yang telah dipersiapkan sebelum turun ke lapangan sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.⁵

³Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*; h. 20.

⁴Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 133.

⁵Masri Singaribun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 192.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan bukti dan keterangan seperti rekaman, kutipan materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada di lokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid.

E. Instrumen Penelitian

Tolak ukur keberhasilan penelitian juga tergantung pada instrument yang digunakan. Penelitian sebagai humant instrumen berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, guna untuk melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan nantinya. Agar validitas hasil penelitian bisa bergantung pada kualitas instrument pengumpulan data.

Ada beberapa jenis instrument yang digunakan penulis, yaitu:

1. Panduan Observasi, adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman pengumpulan data pada proses penelitian.
2. Pedoman wawancara, adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang dipakai dalam mengumpulkn data.
3. Data dokumentasi, adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung atau arsip-arsip, serta foto-foto pada saat penelitian sedang berlangsung.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul guna memperoleh kesimpulan yang valid, maka digunakan teknik analisis data dengan metode kualitatif.

Adapun teknis dan interpretasi data yang digunakan yaitu:

1. Reduksi data (seleksi data), yang prosesnya dilakukan sepanjang penelitian berlangsung dan penulisan laporan. Penulis mengolah data

dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat di lapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan. Data dikumpulkan, dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian.

2. Sajian data, dengan berusaha menampilkan data yang dikumpulkan. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif yakni menguraikan setiap permasalahan penelitian dengan memaparkannya secara umum kemudian menjelaskannya secara spesifik.⁶

Penarikan kesimpulan, dalam hal ini penulis menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih merupakan kesimpulan sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama di lapangan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.

⁶Abdul Kadir, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data*, (Makassar : tp. 2012), h. 4.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Lautang Kecamatan Belawa

1. Sejarah dan Pemerintahan Desa Lautang

Desa lautang duluhnya merupakan sebuah dusun dari desa lemporilau, Dusun lautang di Mekarkan menjadi desa Persiapan, dan nama lautang di abadikan menjadi desa Lautang yang berarti selatang dan di bagi menjadi 3 dusun yaitu :

- a. Dusun Lakoro
- b. Dusun Abbanuang
- c. Dusun Wette

Adapun luas wilayah Desa Lautang 23,50 km² dan adapun batas batas Desa Lautang yaitu:

1. Sebelah Utara : Kelurahan Belawa
2. Sebelah Timur : Desa Lemporilau
3. Sebelah Selatan : Danau Tempe
4. Sebelah Barat : Desa Leppangeng

Tabel I
NAMA-NAMA KEPALA DESA SEJAK BERDIRINYA DESA
LAUTANG

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1996-2003	ANDI PANGERAN	-
2	2000-2010	Andi Cenderawasi	-
3	2010-2015	Andi ismail	-
4	2015-2021	MUH. NAIN	

2. Kondisi Desa

a. Geografis

Desa Lautang terletak 47,7 KM dari Ibukota Kabupaten Wajo, atau 0,7 Km dari Ibukota Kecamatan dengan luas wilayah 23, Km², dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Belawa
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Tempe
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desac Limpo Rilau
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Leppangeng

Tabel II
GEOGRAFIS DESA LAUTANG

Kode Wilaya	Desa/Kelurahan	Letak Desa		Status Daerah	
		Petani	B. Pantai	Kota	Pedesaan
1	2	3	4	5	6

1 001	Leppangeng	—	√	—	√
2 002	Lutang	—	√	—	V
3 003	Limpo Rilau	—	V	—	v
4 003	Belawa	—	V	—	√
5 005	Macero	—	V	—	v
6 006	Malakke	—	V	—	√
7 007	Ongkoe	—	V	—	v
8 008	Sappa	—	V	—	v
9 009	Wele	—	V	—	v
Jumlah		—	9	—	9

b. Iklim

Keadaan iklim di Desa Lautang terdiri dari: Musim Hujan, kemarau dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara Bulan Januari s/d April, musim kemarau antara bulan Juli s/d November, sedangkan musin pancaroba antara bulan Mei s/d Juni.

c. Jumlah Penduduk

(Jumlah Penduduk/KK, Jiwa, RTM = 120 KK, RTSM = 92 KK, Non RTM = 71 KK).

Tabel III
Jumlah Penduduk Sesuai dengan Dusun/Lingkungan

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH JIWA			KEPALA KELUARGA
		L	P	TOTAL	
1.	Dusun Lakoro	739	763	1.502	347
2.	Dusun Abbanuang	855	920	1.775	374
3.	Dusun Wette	210	230	440	122
	Jumlah	1.804	1.913	3.717	843

Jumlah penduduk 3394 jiwa termasuk jumlah yang besar bagi ukuran suatu desa. Penduduk yang jumlahnya besar akan menjadi satu kekuatan/potensi pembangunan bilamana memiliki kompetensi sumberdaya manusia. Komposisi perbandingan jumlah laki-laki dengan perempuan adalah hampir seimbang (1,02 : 1).

Pertumbuhan penduduk yang tidak stabil setiap tahun, di satu sisi menjadi beban pembangunan karena ruang gerak untuk produktivitas masyarakat makin rendah, apalagi jika tidak diikuti peningkatan pendidikan yang dapat menciptakan lapangan kerja. Memang tidak selamanya pertambahan penduduk membawa dampak negatif, malahan menjadi positif jika dapat diberdayakan secara baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ketenagakerjaan yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan secara komprehensif adalah terjadinya peningkatan angka usia kerja setiap tahunnya.

Pertumbuhan angkatan kerja yang memasuki dunia kerja di mana dari angkatan kerja yang mencari kerja tersebut tidak dapat terserap pada lapangan kerja yang tersedia khususnya dalam konteks hubungan kerja (bekerja di sektor pemerintah atau di sektor swasta/perusahaan), karena memang daya serap dari sektor-sektor tersebut sangat terbatas, sehingga sebagai “katup pengaman” harus dapat dikembangkan sebagai potensi atau peluang bekerja terbuka luas melalui kerja mandiri/wirusaha (sektor ekonomi non formal).

d. Tingkat Pendidikan

Tabel IV
Tingkat Pendidikan

TDK TAMAT SD	SD	SMP	SLTA	SARJANA
960	1.582	696	185	13

e. Mata Pencarian

Tabel V
Mata Pencarian

PETANI	PEDAGANG	PNS	BURUH
394	10	20	13

f. Pola Penggunaan Tanah

Pola penggunaan tanah umumnya digunakan sebagai lahan persawahan, perkebunan (sayuran, jagung, dan Lain-lain.) dengan panen musiman.

g. Sarana dan Prasarana Desa

Tabel VI
Sarana / Prasarana Desa

Kantor BPD	Kantor Desa	Balai Desa	Jalan Kabupaten	Jalan Kecamatan	Jalan Desa	Masjid	Sekolah
-	1 Bh	1	47,7 Km	0,7 Km		5 Bh	8 Bh

Sarana transportasi jalan desa tergolong kurang memadai karena sebagian masih perkerasan, selainnya itu ada pula jalan dusun yang menuju ke langsung ke perumahan penduduk, jalur ini juga dapat dilalui kendaraan dengan cukup lancar meskipun jalannya masih jalan perkerasan yang menghubungkan keempat dusun sehingga terjadi kendala pada saat musim hujan. Jalan poros desa adalah jalan beton yang menghubungkan desa Lautang dengan kelurahan Belawa. Sedangkan jalan yang menghubungkan desa Lautang dengan desa Limporilau merupakan jalan perkerasan.

Sarana dan prasarana sosial yang ada yaitu ; Sarana pendidikan berupa Sekolah Dasar 4 Unit, Taman kanak-kanak 1 unit dan SMP 1 Unit , sarana kesehatan berupa Pustu 1 Unit an Posyandu 3 Unit Serta Mesjid 5 Buah.

Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan lainnya, khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas SDM.

Program pembangunan infrastruktur pada dasarnya adalah pembangunan sarana dan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah.

Program untuk pembangunan infrastruktur wilayah perdesaan adalah:

- a) Membangun jalan-jalan perdesaan dan meningkatkan Kualitas jalan desa;
- b) Pembangunan prasarana perekonomian dan pertanian;
- c) Pembangunan prasarana pemerintahan desa.

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Seseorang untuk Melakukan Perjudian Online

Perjudian *online* sudah menjadi isu umum di kalangan masyarakat. Para pemainpun bukan saja berasal dari kalangan orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak. Hal ini tentu sangat menghawatirkan, tidak bisa dibayangkan bagaimana masa depan bangsa ketika anak-anak ini telah terjerumus dalam kejahatan perjudian *online* ini.

Dalam penelitian ini, saya sebagai peneliti mengumpulkan dua belas informan yang bermain judi *online*. Diantara informan yang dikumpulkan Ada diantara profesinya sebagai petani, supir, penjual ikan dan bahkan ada juga dari kalangan mahasiswa.

Adapun data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

TABEL I
WAWANCARA MASYARAKAT

NAMA	PEKERJAAN	ALASAN BERMAIN JUDI ONLINE	PENGETAHUAN TENTANG UNDANG- UNDANG ITE	TEMPAT BERMAIN	SUMBER INFORMASI TENTANG JUDI ONLINE
LR	Petani	Hobi	Tidak Tahu	Laptop	Teman dan Google
GT	Petani	Hobi	Tidak Tahu	Hp dan Laptop	Teman dan Google
NH	Karyawan	Sering Menang	Tidak Tahu	Warnet	Teman dan Google
STI	Pengawas	Hiburan	Kurang Tahu	Warnet	Teman dan Google
AKB	Penjual Ikan	Iseng-Iseng	Tidak Tahu	Hp dan Laptop	Teman dan Google
ARS	Petani	Hiburan	Tidak Tahu	Hp dan Warnet	Teman dan Google
ASTU	Irt	Hiburan	Tidak Tahu	Hp dan Warnet	Teman
ICL	Swasta	Hobi	Tidak Tahu	Laptop / Rumah	Teman
AGS	Supir	Hiburan	Tidak Tahu	Warnet	Teman
UKH	Petani	Hiburan	Tidak Tahu	Hp	Teman
AMR	Mahasiswa	Hiburan	Kurang Tahu	Hp / Laptop	Teman
MC	Mahasiswa	Pengisi Waktu	Tahu	Laptop / Hp	Teman

Sumber : Data Primer hasil wawancara dengan informan di Desa Lautang Kecamatan Belawa.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa faktor dominan penyebab terjadinya kejahatan perjudian *online* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lautang Kecamatan Belawa adalah faktor lingkungan yang sangat berpengaruh bagi perilaku dan karakter seseorang. Maka ini sesuai dengan teori yang dikatakan oleh bapak Ardi yang menganggap bahwa individu di dalam masyarakat mempunyai kecenderungan menjadi baik atau jahat. Baik dan jahatnya seseorang tergantung pada masyarakatnya. Jadi masyarakatlah yang membentuk seseorang menjadi jahat atau baik.

Selain faktor lingkungan, faktor penyebab seseorang bermain judi *online* di Desa Lautang adalah faktor keluarga dan Internet (teknologi informasi). Keluarga yang seharusnya menjadi pelindung bagi anggota keluarganya yang lain malah memberikan ancaman yang sangat besar bagi sebagian anggota dalam keluarganya. Ini tentu saja sangat memprihatinkan. Perkembangan teknologi Juga mengambil peranan penting dalam sebuah hubungan keluarga. Salah satunya dengan media sosialnya. Indonesia adalah pengguna Facebook terbanyak di dunia. Yaitu berjumlah 47.166.080 pengguna.

Dari tabel diatas juga dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi bukanlah menjadi faktor penyebab secara langsung, karena berdasarkan pendapatan mereka. Mereka bukanlah golongan orang-orang menengah jika dilihat dari segi penghasilan.

Dalam menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian *online* yang dilakukan masyarakat di Desa Lautang Kecamatan Belawa, saya sebagai penulis membagi 2 faktor secara garis besar :

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang menjadi penyebab anak melakukan kejahatan perjudian *online* yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Adapun beberapa faktor internal adalah :

a. Rasa keingintahuan

Rasa keingintahuan pada sebagian masyarakat sangatlah besar, sehingga hampir 25% dari 100% masyarakat cenderung selalu mencoba hal-hal baru walaupun mereka tahu bahwa hal tersebut adalah sebuah perilaku yang tidak baik. Dari semua

informan yang saya wawancarai, mereka sadar bahwa perjudian *online* yang mereka lakukan bukanlah suatu perilaku yang baik. Tetapi karena perasaan keingintahuan lebih besar, maka mereka melakukan perjudian *online* ini.

b. Kehendak ingin bebas

Kehendak ingin bebas adalah merupakan salah satu sifat alamiah manusia. Setiap manusia tentu ingin memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Sebagian pejudi *online* selalu menganggap aturan adalah sesuatu yang menekan kehendak ingin bebas mereka, sehingga penjudi memiliki kecenderungan lebih besar melakukan sebuah pelanggaran atau kejahatan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan atau pelanggaran berasal dari luar diri mereka. Faktor eksternal penyebab seseorang melakukan kejahatan perjudian *online* adalah :

a. Faktor keluarga

Keluarga adalah tempat pertama anak mempelajari segala hal. Di dalam keluarga seseorang mengenal cinta, kasih sayang, simpati, loyalitas, ideologi, bimbingan, agama dan pendidikan. Peran keluarga sangatlah penting bagi kehidupan yang akan dialami di masa yang akan datang.

Faktor keluarga inilah yang menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan kejahatan perjudian *online*. Tiga dari sepuluh informan yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka mengenal dan tertarik bermain judi *online* ini dari keluarganya. Dalam hal ini Ayah dan Ibu mereka. Tentu hal ini sangatlah

memprihatinkan, karena keluarga yang seharusnya menjadi pendidik utama bagi keluarga yang lainnya untuk melakukan hal-hal baik, malah menjadi penyebab utama kehancuran dalam sebuah hubungan keluarga.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan tempat yang sangat berpengaruh bagi perkembangan jiwa seseorang. Lingkungan dapat memberikan dampak positif, tetapi tidak jarang pula memberikan dampak negatif bagi jiwa seseorang. Lingkungan yang baik tentu memberikan dampak positif. Faktor lingkungan adalah faktor terbesar penyebab seseorang melakukan sebuah pelanggaran atau kejahatan. Hampir dari semua informan mengatakan bahwa mereka mengenal perjudian *online* tersebut dari teman-teman bergaul mereka.

c. Faktor Teknologi Informasi

Indonesia merupakan pengguna terbanyak media sosial facebook dan media sosial lainnya. Tentu hal ini pada saat sekarang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jiwa seseorang. Internet dapat berpengaruh baik tapi juga dapat berpengaruh buruk. Berpengaruh baik apabila seseorang menggunakan internet sebagai sarana belajar dan hal-hal positif lainnya. Tetapi berpengaruh buruk apabila digunakan untuk tujuan yang buruk juga salah satunya bermain judi *online*.

Hampir dari semua informan yang diwawancarai mengatakan mereka mengenal judi *online* dari internet lebih tepatnya dari media sosial facebook. Kebebasan mereka untuk mengakses internet dari manapun dan kapanpun juga menjadi salah satu penyebab.

C. Dampak Yang Di Timbulkan Judi Online di Desa Lautang Kecamatan Wajo

TABEL I
WAWANCARA MASYARAKAT DESA LAUTANG

NO.	NAMA	WAKTU PERMAINAN	DAMPAK JUDI <i>ONLINE</i>
1	LR	2 Tahun	Ketagihan & Ekonomi Lemah
2	GT	7 Tahun	Bangkrut
3	NH	3 Tahun	Beli Hp
4	STI	4 Tahun	Sosial & Ekonomi
5	AKB	4 Tahun	Sosial & Ekonomi
6	ARS	2 Tahun	Sosial & Ekonomi
7	ASTU	1 Tahun	Dampak Ekonomi
8	ICL	5 Tahun	Tidak Ada
9	AGS	4 Tahun	Beli Motor
10	UKH	2 Tahun	Tidak Ada
11	AMR	3 Tahun	Tidak Ada
12	MC	1 Tahun	Sosial & Ekonomi

Sumber : Data Primer hasil wawancara dengan informan di Desa Lautang Kecamatan Belawa.

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa dampak judi online dapat berpengaruh terhadap prilaku dan karakter. Selain itu dampak judi *online* juga merambat keperekonomian serta sosial.

Selain itu judi *onlone* merupakan bentuk perjudian yang menggunakan internet. Meningkatnya popularitas berbagai bentuk perjudian internet seperti *online* poker, bingo dan casino *online* sangat mempengaruhi masyarakat. Eksposur berlebihan kesitus perjudian *online* dapat menyebabkan kecanduan. Perjudian adalah tentang menang dan kalah. Kehilangan uang dalam jumlah besar dapat menyebabkan depresi. Taruhan dengan uang dalam jumlah besar dapat menyebabkan kebangkrutan.

TABEL II
WAWANCARA MASYARAKAT DESA LAUTANG

No.	Nama	Jenis Situs Perjudian	Jenis Permainan	Jumlah Pemain Per Set
1	LR	WWW.IMCPOKER.COM	Domino 99	Enam (6)
2	GT	WWW.IMCPOKER.COM	Domino 99 & Poker	Tujuh (7)
3	NH	WWW.IMCPOKER.COM	Domino 99	Enam (6)
4	STI	WWW.SBOBETPH.COM	Sbobet & Poker	Jutaan
5	AKB	WWW.IMCPOKER.COM	Domino 99	Enam (6)
6	ARS	WWW.IMCPOKER.COM	Domino 99	Enam (6)
7	ASTU	WWW.PELANGI.COM	Domino 99	Enam (6)
8	ICL	WWW.IMCPOKER.COM	Domino 99	Enam (6)
9	AGS	WWW.IMCPOKER.COM	Domino 99	Enam (6)
10	UKH	WWW.IMCPOKER.COM	Domino 99	Enam (6)
11	AMR	WWW.IMCPOKER.COM	Domino 99	Enam (6)
12	MC	WWW.SBOBETPH.COM	Sbobet & Poker	Jutaan

Sumber : Data Primer hasil wawancara dengan informan di Desa Lautang Kecamatan Belawa.

Beberapa tahun terakhir ini pengembangan peluang judi *online* telah sampai untuk anak-anak dan remaja. Situs-situs perjudian *online* sudah mulai menargetkan banyak kawula muda dari masyarakat, karna lebih mudah untuk mengikat mereka dengan hadiah gratis dan diskon. Survei telah mengungkapkan bahwa anak-anak dan remaja adalah yang paling terkena dampak perjudiann *online*.

Kurangnya regulasi menimbulkan penyebaran praktek-praktek ilegal dan penggunaan sumber daya yang tidak adil. Praktek perjudian yang tidak diatur dapat mengakibatkan pengeluaran uang yang tidak beralasan dan buang waktu. selain itu, judi online melibatkan transfer dana *online* yang memerlukan pertukaran informasi melalui internet hacker dapat dengan mudah mengakses rincian pengguna tersebut

dari situs perjudian *online*.

Gangguan judi patologis memiliki gejala yang mirip dengan kecanduan. Hal ini menggambarkan dimana seseorang terkait dengan perjudian sehingga perilakunya menghambat kehidupan sosialnya. Korban gangguan judi patologis tetapsibuk dengan pikiran perjudian. Mereka merasa perlu untuk berjudi *online* dengan uang dalam jumlah tinggi. Mereka cenderung mengambil resiko dalam jumlah besar dan gagal untuk menahan godaan perudian.

Kerugian dari perjudian online adalah membuang waktu berharga dan uang. Waktu yang berharga dan uang yang dapat di infestasikan untuk tujuan konstruktif daripada terbuang untuk taruhan.

Perjudian membawa dampak negatif dan bahaya yang sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, antara lain yaitu:

- a. Mendatangkan permusuhan dan dendam diantara para pemain judi.
- b. Menghalangi dan menolak untuk ingat Allah SWT dan Shalat.
- c. Mendatangkan krisis moral dan menurunnya etos kerja, akibat manusia terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas karena mengharapkan harta yang diragukan tibanya.
- d. Dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan sumber-sumber kekayaan secara dramatis dan tiba-tiba.¹
- e. Merusak masyarakat, dengan merajalelanya judi, maka timbul pula berbagai tindak kriminal lainnya.

¹E.Syibili Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008), h. 263.

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan Perjudian Online yang Dilakukan oleh Masyarakat Desa Lautang Kecamatan Belawa

Dalam ensiklopedia Indonesia judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa judi *online*. Adalah kegiatan perjudian yang dilakukan secara *online* (menggunakan fasilitas internet). Pada penelitian ini upaya penanggulangan judi *online* di Desa Lautang Kecamatan Belawa.

Setelah Mengetahui faktor-faktor yang menghambat penanganan kejahatan perjudian *online* ini, tentu upaya yang dapat untuk menanggulangi perjudian *online* yang dilakukan oleh masyarakat adalah pelajaran moral yang diberikan oleh orang keluarga, meningkatkan kualitas individu aparat penegak hukum (polisi) serta menumbuhkan kesadaran dan kepedulian serta peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak yang berwenang.

Upaya penanggulangan kejahatan perjudian *online* terdiri dari beberapa cara:

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya pencegahan ini adalah upaya pencegahan secara dini yang dilakukan mencari akar masalah melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi masyarakat untuk tidak berniat melakukan kejahatan perjudian *online* tersebut.

Upaya Pre-Emtif yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan perjudian *online* ini merupakan peran semua anggota masyarakat. karena menurut informan mereka tahu bahwa perjudian *online* merupakan sebuah perbuatan yang buruk. Tapi

pada kenyataannya dari seluruh informan yang penulis wawancara. Tidak ada satupun yang mengetahui tentang adanya aturan yang mengatur tentang perjudian *online* ini (UU ITE). Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya pre-emptif tidak berjalan sebagaimana mestinya.

2. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan untuk melakukan sebuah kejahatan. Upaya ini adalah tindakan lanjut dari upaya pre-emptif yang tidak maksimal yang menyebabkan timbulnya niat untuk melakukan sebuah kejahatan.

Dalam kasus perjudian *online* ini, dari hasil wawancara penulis dengan para informan yang melakukan perjudian *online* mereka merasa bebas untuk melaksanakan kegiatan bermain judi *online* ini. Hal ini dikarenakan para informan dapat bermain di rumah maupun di tempat umum.

3. Upaya Reprensif

Upaya ini adalah upaya yang dilakukan ketika upaya pre-emptif maupun upaya preventif tidak dapat mencegah terjadinya suatu kejahatan. Sehingga upaya reprensif harus dilakukan yaitu penindak tegas para pelaku kejahatan.

Berdasarkan wawancara saya dengan kepala Pembina desa lautang kecamatan belawa dengan Mulyadi, bahwa sejak UU ITE dikeluarkan, belum pernah pihak polsek menangani kasus perjudian *online* di desa lautang, berdasarkan ini dapat disimpulkan bahwa belum ada tindakan reprensif yang dilakukan penegak hukum di desa lautang kecamatan belawa.

Menurut W.A. Bongger, seorang ahli kriminologi, mengatakan bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali. Oleh karena itu belum terlambat untuk menanggulangi kejahatan perjudian *online* yang dilakukan oleh seseorang, asalkan melibatkan semua unsur terkait terutama peran orang keluarga untuk memperhatikan anggota keluarganya.

E. Analisis Hukum Islam terhadap Judi Online

Maisir/judi adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam Al-Qur'an. Para fuqaha tidak menempatkan perjudian sebagai salah satu pembahasan dalam delik pidana, jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *jarimah ta'zir*.

Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *jarimah ta'zir*.²

Jarimah ta'zir itu jumlahnya sangat banyak sekali, yaitu semua *jarimah* selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas diyat* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua: Pertama, *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nash* Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. Syara' hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja.³

²Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 92 -93.

³Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, h.140.

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang sering-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Syari'ah hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai *jarimah*; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya.

Sedangkan sebagian *jarimah ta'zir* diserahkan pada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nash-nash* (ketentuan syara') dan prinsip-prinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.⁴

Perbedaan antara *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh syara' dengan *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa ialah kalau *jarimah ta'zir* macam pertama tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga, akan tetapi *jarimah ta'zir* macam yang kedua bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.⁵

Hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang dijatuhkan atas *jarimah-jarimah* yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum syari'at yaitu *jarimah hudud* dan *jarimah diyat*. Hukuman tersebut banyak jumlahnya yang dimulai dari

⁴Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 9.

⁵Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 9.

hukuman yang sangat ringan sampai yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya.⁶

Para ulama telah menyusun jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku *jarimah ta'zir*. Jenis hukuman tersebut adalah hukuman kawalan (kurungan), *jilid* (dera), pengasingan, pengucilan, ancaman, teguran, dan denda.⁷

- a. Hukuman Kawalan (Kurungan) Hukuman kawalan dalam syari'at Islam, yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas (terbatas atau tidak terbatas di sini adalah dari segi waktu).⁸ Batas terendah dari hukuman ini satu hari, sedang batas setinggi-tingginya tidak menjadi kesepakatan. Ulama-ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertinggi satu tahun, karena mereka mempersamakan dengan pengasingan dalam zina.⁹ Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan itu tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat sampai baik pribadinya.
- b. Hukuman Jilid Hukuman *jilid* merupakan hukuman yang pokok dalam syari'at Islam, di mana untuk *jarimah-jarimah hudud* sudah tertentu jumlahnya, misalnya 100 kali untuk zina dan 80 kali untuk *qazaf*, sedang untuk *jarimah ta'zir* tidak

⁶Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 299.

⁷Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, h. 143.

⁸Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 158.

⁹Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 308.

tertentu jumlahnya. Bahkan untuk *jarimah ta'zir* yang berbahaya hukuman *jilid* lebih diutamakan.¹⁰

Dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 219, Allah SWT menjelaskan bahwa khamar dan *al-maysir* mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia. akan tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Manfaat yang dimaksud ayat itu, khususnya mengenai *al-maysir*, adalah manfaat yang hanya dinikmati oleh pihak yang menang, yaitu beralihnya kepemilikan sesuatu dari seseorang kepada orang lain tanpa usaha yang sulit. Kalaupun ada manfaat atau kesenangan lain yang ditimbulkannya, maka itu lebih banyak bersifat manfaat dan kesenangan semu. Al-Alusi¹¹ menyebutkan beberapa di antaranya, yaitu kesenangan kejiwaan, kegembiraan yang timbul dengan hilangnya ingatan dari segala kelemahan (aib), ancaman bahaya dan kesulitan hidup.

Pada bentuk permainan *al-mukhâtharah*, pihak yang menang bisa memperoleh harta kekayaan yang dijadikan taruhan dengan mudah dan bisa pula menyalurkan nafsu biologisnya dengan isteri pihak yang kalah yang juga dijadikan sebagai taruhan. Sedang pada bentuk *al-tajzi'ah*, pihak yang menang merasa bangga dan orang-orang miskin juga bisa menikmati daging unta yang dijadikan taruhan tersebut. Akan tetapi, *almaysir* itu sendiri dipandang sebagai salah satu di antara dosa-dosa besar yang dilarang oleh agama Islam.

¹⁰Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 205.

¹¹Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, h. 61.

Penegasan yang dikemukakan pada surah Al-Baqarah (2) ayat 219 bahwa dosa akibat dari *al-maysir* lebih besar daripada manfaatnya memperjelas akibat buruk yang ditimbulkannya. Di antara dosa atau risiko yang ditimbulkan oleh *al-maysir* itu dijelaskan dalam surah Al-Mâ'idah (5) ayat 90 dan 91. Kedua ayat tersebut memandang bahwa *al-maysir* sebagai perbuatan setan yang wajib dijauhi oleh orang-orang yang beriman. Disamping itu, *al-maysir* juga dipergunakan oleh setan sebagai alat untuk menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, terutama para pihak yang terlibat, serta menghalangi konsentrasi pelakunya dari perbuatan mengingat Allah dan menunaikan shalat.

Menurut Ibn Taymiyah,¹² Syari' melarang riba karena di dalamnya terdapat unsur penganiayaan terhadap orang lain. Sedang larangan terhadap judi juga didasarkan pada adanya kezaliman dalam perbuatan tersebut. Riba dan judi diharamkan Al-Qur'an karena keduanya merupakan cara penguasaan atau pengalihan harta dengan cara yang batil. Oleh karena itu, segala jenis kegiatan mu'amalah yang dilarang Rasulullah saw, seperti jual beli gharar, jual beli buahan yang belum sempurna matangnya, dan sebagainya, bisa termasuk dalam kategori riba dan juga termasuk dalam kategori judi (spekulasi).

Lebih lanjut, Ibn Taymiyyah.¹³ menjelaskan bahwa ada dua *mafsadah* yang terdapat di dalam judi, yaitu *mafsadah* yang berhubungan dengan harta dan *mafsadah* yang berhubungan dengan perbuatan judi itu sendiri. *Mafsadah* yang berhubungan

¹²Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, h. 61.

¹³Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, h. 63.

dengan harta adalah penguasaan harta orang lain dengan cara yang batil. Sedang *mafsadah* yang berhubungan dengan perbuatan, selain tindakan penguasaan itu sendiri, adalah *mafsadah* yang bersifat efek samping yang ditimbulkannya terhadap hati (jiwa) dan akal. Sementara masing-masing dari kedua *mafsadah* itu memiliki larangan secara khusus. Secara tersendiri, penguasaan terhadap harta orang lain dilarang secara mutlak, walaupun tindakan itu dilakukan bukan dengan cara perjudian, seperti larangan memakan riba. Sedang terhadap tindakan yang melalaikan dari mengingat Allah dan shalat, serta tindakan yang menimbulkan permusuhan juga dilarang, walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan cara menguasai harta orang lain dengan cara yang batil, seperti meminum khamar. Oleh karena di dalam judi itu terdapat dua *mafsadah* sekaligus, maka pengharamannya juga lebih kuat dibanding riba dan minum khamar. Oleh karena itu jugalah pengharaman judi itu lebih dulu dibanding pengharaman riba. Beliau juga menegaskan bahwa dari berbagai aspeknya, pengharaman judi mencakup unsur-unsur yang menjadi sebab diharamkannya riba dan meminum khamar.

Al-Qurthubiy¹⁴ menceritakan bahwa 'Umar menerapkan hukuman (hadd) dengan cambukan berkali-kali dan mengasingkan peminum khamar, Muhjan al-Tsaqafiy, yang secara sengaja dan membangga-banggakan perbuatannya. Padahal Muhjan termasuk salah seorang anggota pasukan umat Islam yang sangat pemberani. Ia diasingkan 'Umar dan baru dibolehkan kembali ke Madinah ketika ia sudah tobat

¹⁴Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, h. 63.

dan ia pun ikut dalam peperangan Qadisiyah. Pada waktu itu ia bersumpah tidak akan meminum khamar lagi selama-lamanya.

Al-Alusiyy.¹⁵ menjelaskan bahwa kemudharatan yang dapat ditimbulkan oleh perjudian antara lain, selain perbuatan itu sendiri merupakan cara peralihan (memakan) harta dengan cara yang batil, adalah membuat para pecandunya memiliki kecenderungan untuk mencuri, menghancurkan harga diri, menyia-nyiakan keluarga, kurang pertimbangan dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, berperangai keji, sangat mudah memusuhi orang lain.

Semua perbuatan itu sesungguhnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang sangat tidak disenangi orang-orang yang berfikir secara sadar (normal), tapi orang yang sudah kecanduan dengan judi tidak menyadarinya, seolah-olah ia telah menjadi buta dan tuli. Selain itu, perjudian akan membuat pelakunya suka berangan-angan dengan taruhannya yang mungkin bisa memberikan keuntungan berlipat ganda.

Kebiasaan suka berangan-angan atau panjang angan-angan memberikan dampak negatif yang sangat banyak. Kebiasaan seperti itu sangat dikhawatirkan Nabi terjadi pada dirinya dan pada umatnya.

Pernyataan kekhawatiran Nabi, khusus tentang panjang angan-angan, dalam hadis itu hanya diikuti oleh satu alasan, yaitu "akan membuat lupa kepada akhirat". Namun demikian, para intelektual muslim memberikan penjelasan yang cukup rinci, dari kacamata psikologis, tentang dampak negatif panjang angan-angan itu. Menurut Al-Fadhil bin 'Iyadh, di samping empat sifat kejiwaan lainnya, panjang angan-angan

¹⁵Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, h. 64.

merupakan pertanda bahwa si pemiliknya (akan) mengalami hidup susah (celaka). Hal itu terlihat dari pernyataannya berikut. Ada lima pertanda hidup susah, yaitu hati yang sesat, mata yang kaku (picik), kurang rasa malu, sangat mencintai dunia, dan panjang angan-angan.

Sedangkan menurut Al-Qasim, panjang angan-angan adalah penyebab dari semua jenis kemaksiatan manusia. Lengkapnya pernyataan Al-Qasim tersebut adalah sebagai berikut. Fondasi cinta adalah pengetahuan. Fondasi taat adalah membenaran. Fondasi khawf (ketakutan kepada Allah) adalah pendekatan diri kepada-Nya. Sumber kemaksiatan adalah panjang angan-angan. Dan kecintaan kepada kekuasaan adalah sumber dari semua bencana (politik).¹⁶

Al-Ashbihaniy.¹⁷ menyebutkan beberapa dampak lain yang sangat fatal dari sifat panjang angan-angan ini. Di antaranya adalah mendorong palakunya malas berusaha tapi sangat berharap pada sesuatu yang dijanjikan, takut kepada makhluk tapi tidak takut kepada Allah, berlindung kepada Allah dari (aniaya) orang yang ada di atasnya (lebih kuat atau lebih kuasa) tapi tidak berlindung kepada Allah terhadap orang yang ada di bawahnya, takut mati tapi tidak berupaya memaknainya, mengharapkan manfaat ilmu tapi tidak mengamalkannya, sangat yakin pada keburukan (kemudharatan) kebodohan dan mencela orang yang melakukannya tapi tidak sadar bahwa ia juga sesungguhnya dalam hal yang sama, selalu melihat orang yang lebih, dalam hal harta tapi melupakan orang yang berkekurangan, takut kepada

¹⁶Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, h. 65.

¹⁷Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, h. 67.

orang lain karena kesalahan terbesar yang dilakukannya tapi mengharapkan manfaat dengan amal paling ringan yang dilakukannya. Masih sangat banyak dampak negatif dari sifat ini, yang semuanya memberikan kesimpulan bahwa adalah logis kalau Allah dan Rasul-Nya mengharamkan judi dengan segala jenisnya.

Dengan pertimbangan rasional saja, karena sedemikian besarnya bahaya yang ditimbulkannya, mestinya perjudian tersebut sudah harus ditinggalkan dan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang. Sehubungan dengan ini, al-Sathibiy¹⁸ menjelaskan bahwa karena bahaya yang terdapat pada judi (dan khamar) jauh lebih besar daripada manfaatnya, maka ditinggalkanlah hukum yang sesuai dengan kemaslahatan dan pekerjaan tersebut hukumnya menjadi haram. Hal itu sejalan dengan kaidah syar'iiyyah yang mengatakan Jika (dalam satu kasus) kemudahan lebih dominant daripada masalah, maka hukum memihak kepada kemudahan.

Untuk substansi yang sama, Al-Alusiy¹⁹ mengemukakan formulasi kaidah yang sedikit berbeda dengan yang dikemukakan oleh Al-Sathibiy. Al-Alusiy mengatakan sebagai berikut Sesungguhnya apabila mafsadah lebih dominan daripada mashlahah, maka perbuatan tersebut ditetapkan haram hukumnya.

¹⁸Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, h. 67.

¹⁹Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, h. 68.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Untuk Melakukan Perjudian Online

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan infoman bahwa faktor dominan penyebab terjadinya kejahatan perjudian *online* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lautang Kecamatan Belawa adalah faktor lingkungan yang sangat berpengaruh bagi perilaku dan karakter seseorang. Selain faktor lingkungan, faktor penyebab seseorang bermain judi *online* di Desa Lautang adalah faktor keluarga dan Internet (teknologi informasi).

Dalam menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian *online* yang dilakukan masyarakat di Desa Lautang Kecamatan Belawa, saya sebagai penulis membagi 2 faktor secara garis besar :

a. Faktor Internal

Yaitu faktor yang menjadi penyebab anak melakukan kejahatan perjudian *online* yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri.

b. Faktor eksternal

Yaitu faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan atau pelanggaran berasal dari luar diri mereka.

2. Dampak Yang Di Timbulkan Judi Online di Desa Lautang Kecamatan Wajo

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat di simpulkan bahwa dampak judi online dapat berpengaruh terhadap prilaku dan karakter. Selain itu dampak judi *online* juga merambat keperekonomian serta sosial.

Perjudian membawa dampak negatif dan bahaya yang sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, antara lain yaitu:

- a. Mendatangkan permusuhan dan dendam diantara para pemain judi.
- b. Menghalangi dan menolak untuk ingat Allah SWT dan Shalat.
- c. Mendatangkan krisis moral dan menurunnya etos kerja, akibat manusia terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas karena mengharapkan harta yang diragukan tibanya.
- d. Dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan sumber-sumber kekayaan secara dramatis dan tiba-tiba.
- e. Merusak masyarakat, dengan merajalelanya judi, maka timbul pula berbagai tindak kriminal lainnya.

B. Implikasi Penelitian

Adapun beberapa saran untuk para pejudi online agar bias melepaskan diri dari kebiasaan judi, yaitu :

1. Jika ingin berhenti berjudi, mulai dari sekarang bulatkan tekad dan kemauan kita untuk bisa berhenti dari permainan menyesatkan ini.
2. Banyak beribadah dan membaca kitab suci akan membuat hati lebih tenang dan menghindarkan fikiran-fikiran buruk yang membuat kita kembali berjudi.

3. Tanamkan dalam pikiran bahwa judi adalah hal yang tidak bermanfaat.
4. Cari lingkungan pertemanan baru yang dapat memberikan pengaruh positif dan membuat kita terlepas dari jerat judi yang menyesatkan.
5. Mencari kegiatan lain yang lebih bermanfaat, positif dan menantang daripada berjudi seperti olahraga, jalan-jalan, dan membaca buku.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abdurrahman Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* Malang: UMM Press, 2009.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* Bandung: CP. Citra Aditya Bakti, 1995.

Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Al -Mawardi, Imam, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud-Diniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* Yogyakarta Pustaka Progressif, 1997.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Haryanto, *Indonesia Negri Judi* Jakarta: Erlangga, 2003.

Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam; Fiqih Jinayat* Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Jazuli, A. *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Kadir, Abdul, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data* Makassar : tp. 2012.

Kementrian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an (Al-Qur'an dan Terjemahan)* Solo: PT. Tiga Serangkai, 2014.

Kistanto, Nurdin H. *Kebiasaan Masyarakat Berjudi* Harian Kompas, 4 November 2016.

Mapaseng, Erwin, *"Upaya Pemberantasan Perjudian"*, Harian Kompas, 29 Maret 2017.

Masrum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)* Yogyakarta: FH UII, 1991.

- Martokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
-, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Bumi Aksara, 2006.
- Moeleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Remaja Rosdakarya Bandung 2009.
- Muslih, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Muhammad, Syaikh Al-Allamah, *Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilaf Al-A'Immah*, Terj. Abdullah zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab* Bandung: Hasyimi, 2015.
- Qardhawi, Yusuf, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, *Halal dan Haram dalam Islam* Surakarta: Era Intermedia, 2007.
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI. Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar RI 1945 Surabaya: Arloka, 2002.
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI. Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008.
- Saleh, Wantjik, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Singaribun, Masri dan Sofyan Effendi, *Metode Peneltian Survey* Jakarta: LP3ES, 1989.
- Simoons, D dalam Sudarto, *Huku Pidana I* Semarang :Yayasan Sudarto, 1990.
- Sopalatu, Muh Rahmat Hakim, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi *Online*”, *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: PT. Bima Aksara, 1986.
- Syarjaya, E. Syibili, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam* Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008.
- Wingnjosoebroto, Soetandyo, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia* Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.



Wawancara di Desa Lautang Kec. Belawa Kab. Wajo



Wawancara di Desa Lautang Kec. Belawa Kab. Wajo



Wawan cara di Desa Lautang Kec. Belawa Kab. Wajo



1 2 0 1 7 1 9 1 4 2 1 4 2 9 5

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 14127/S.01P/P2T/09/2017
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Wajo

di-

Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : SI.1/PP.00.9/334/2017 tanggal 25 September 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ASWAR ARDI**
Nomor Pokok : 10400113017
Program Studi : Perbandingan Mazhab & Hukum
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" ANALISIS TINDAK PIDANA HUKUM ISLAM TERHADAP JUDI ONLINE (STUDI KASUS DESA LAUTANG
KEC. BELAWA KAB. WAJO) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **27 September s/d 27 Oktober 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 25 September 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*





SRN CO 0000546

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Jend. Achmad Yani No. 33 Tlp/Fax (0485) 323549

www.bpptpmwajokab@gmail.com, Sangkang (90915), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

IZIN PENELITIAN / SURVEY**Nomor : 0546/IP/DPMPTSP/2017**

- Membaca : Surat Permohonan **ASWAR ARDI** Tanggal **29-09-2017**
Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Wajo

Memperhatikan : 1. Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : SL.1/PP.00.9/334/2017 Tanggal 25 September 2017 Perihal : Izin Penelitian

2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor **00546/IP/TIM-TEKNIS/IX/2017**
Tanggal **29-09-2017** Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

Menetapkan : Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY kepada :

Nama : **ASWAR ARDI**
Tempat / Tgl Lahir : **BELAWA LAUTANG , 11 AGUSTUS 1995**
Alamat : **BELAWA WAJO**
Universitas / lembaga : **UIN ALAUDDIN MAKASSAR**
Judul Penelitian : **ANALISIS TINDAK PIDANA HUKUM ISLAM TERHADAP JUDI ONLINE (STUDI KASUS DESA LAUTANG KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO)**

Lokasi Penelitian : **DESA LAUTANG, KEC. BELAWA**

Lama Penelitian : **27 September 2017 s.d 27 Oktober 2017**

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian / Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah dilizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah
3. Mentaati Semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat

Ditetapkan di : **Sangkang**

Pada Tanggal **29 September 2017**

KEPALA DINAS,



SYAMSU ALAM, S.Sos

Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**

NIP : **19570904 198501 1 001**

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Wajo
2. Kepala Instansi Tempat Penelitian
3. Camat Setempat
4. Peringgal

No. Reg : 0546/IP/DPMPTSP/2017

Retribusi : Rp. 0



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KECAMATAN BELAWA
DESA LAUTANG**

Alamat Jalan KH. Abd Malik Nomor Lakoro Kab. Wajo Kode Pos 90953

SURAT KETERANGAN

Nomor : 503/310/DLT

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Lautang Kecamatan Belawa Kabupaten

Wajo menerangkan bahwa :

Nama : **ASWAR ARDI**
Tempat / Tgl Lahir : **Belawa Wajo, 11 Agustus 1995**
NIM : **10400113017**
Fakultas / Jurusan : **Syariah & Hukum /PMH**
Universitas / Lembaga : **UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Telah melaksanakan penelitian di Desa Lautang, Kec. Belawa Kab. Wajo. Dimulai pada Tanggal 27 September 2017 s/d 7 Oktober 2017 untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul “ANALISIS TINDAK PIDANA HUKUM ISLAM TERHADAP JUDI ONLINE (Studi Kasus Desa Lautang Kec. Belawa Kab. Wajo)”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lakoro, 07 Oktober 2017

Kepala Desa Lautang



MUHL NAIN

RIWAYAT HIDUP



ASWAR ARDI Lahir di Lautang, sebuah desa di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo pada tanggal 11 Agustus 1995, anak ke tiga dari empat bersaudara. Buah hati dari pasangan Bapak H. ARDI dengan Ibu HJ. DALI.

Riwayat pendidikan : pertama kali mengikuti pendidikan formal pada tahun 2001 di Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah As-adiyah 147 Lautang dan tamat pada tahun 2007, dan melanjutkan pendidikan di Tsanawiyah Lautang dan selesai pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MAN Wajo pada tahun 2010 dan tamat pada tahun 2013.

Penulis langsung melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi pada tahun 2013. Penulis diterima di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui jalur Undangan (SBMPTN) pada Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Program Strata 1 (S1). Penulis menyelesaikan studinya pada tahun 2018.